

---

**ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON****PERFORMANCE ANALYSIS OF INCOME AND EXPENDITURE  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON**

Oleh:

**Christin Marciah Poyoh<sup>1</sup>****Sri Murni<sup>2</sup>****Joy E Tulung<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email :

<sup>1</sup>[kay.marciah@gmail.com](mailto:kay.marciah@gmail.com)<sup>2</sup>[srimurnirustandi@yahoo.com](mailto:srimurnirustandi@yahoo.com)<sup>3</sup>[joy.tulung@unsrat.ac.id](mailto:joy.tulung@unsrat.ac.id)

**Abstrak :** Pelaksanaan Otonomi Daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengurus dan mengatur pemerintahannya agar lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangannya. Tujuan Penelitian untuk menganalisis Kinerja Keuangan dari Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon dalam mengelola pendapatannya dikatakan belum baik hal ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa BKD belum mampu merealisasikan pendapatannya lebih dari yang dianggarkan. Kinerja BKD dalam mengelola anggaran belanja dikatakan baik dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi yang dianggarkan. Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon harus memaksimalkan semua sumber pendapatan daerahnya dan mengoptimalkan kinerja belanjanya.

**Kata kunci :** *kinerja keuangan, anggaran pendapatan, belanja*

**Abstract:** The implementation of Regional Autonomy, demanding local governments to be able to attend to and organizes his Government to be more self-sufficient in managing and improving their financial performance. The purpose of the study to analyze the financial performance of the Agency's revenue and Expenditure of the financial area of the city of North Sulawesi. The research method used is Descriptive Quantitative. The results showed the Agency's Financial performance area of Tomohon in managing his income was said to have not been good this is evidenced from the variance of income shows that hasn't been able to realize the BKD revenues more than budgeted. BKD performance in managing a budget said to be this good as seen from from the absence of realization of shopping in excess of budgeted. Regional Financial bodies Tomohon must maximize all revenuesources thegarrison and optimizes the performance budget submission.

**Keywords :** *financial performance, budget revenues, expenditures*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Lahirnya Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas\

Adanya otonomi daerah BKD Kota Tomohon dituntut untuk mampu mengurus dan mengatur pemerintahannya agar lebih mandiri di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangannya.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Kinerja Keuangan dari Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang – undangan dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

### Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

### Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai dan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

### Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

### Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

### Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan

3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis terhadap kinerja pendapatan dapat dilihat secara umum dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerjanya dapat dinilai dengan baik. Mahmudi (2010:135), menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja pendapatan antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Analisis Varians Pendapatan  
Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.
2. Rasio Derajat Desentralisasi  
Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
4. Analisis Varians Belanja  
Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.
5. Analisis Keserasian Belanja
  - a. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja  
Analisis Belanja Modal terhadap Total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.
  - b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja  
Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah
6. Rasio Efisiensi Belanja  
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja

### **Penelitian Terdahulu**

Fitri, dkk(2014) dengan Judul Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja. Bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Semarang. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik. Sandy, dkk(2016) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. Tujuan Penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dalam mengelola Anggaran Pendapatan daerah Tahun anggaran 2010-2014. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Varians Pendapatan sudah baik, dan Varians Belanja sudah baik. Anim (2016). Dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerinth Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Tujuan Penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nabire pada masa otonomi daerah. Metode Penelitian Kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupatenen Sujoharjo masih belum optimal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu jenis data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sugiyono, 2010: 124)

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Tomohon khususnya pada Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Teknik ini dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon periode anggaran 2011 sampai dengan 2015

#### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dan teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

### Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis metode penelitian dimana data yang diperoleh dari sampel dan populasi digunakan penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang kemudian diinterpretasikan (Sugiyono, 2003)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian keuangan yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon.

### Pembahasan

#### Analisis Kinerja Pendapatan

##### 1. Varians Pendapatan

Varians pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Anggaran} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

**Tabel 1. Analisis Varians Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon**

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Varians	Presentase (%)
2011	381.064.756.887	379.437.471.742	1.627.285.145	100.42
2012	386.984.850.513	383.167.685.578	3.817.164.935	100.99
2013	458.778.268.094	455.437.532.416	3.340.735.678	100.73
2014	524.519.878.280	530.553.471.617	6.033.593.337	98.86
2015	548.414.690.478	563.951.482.742	15.536.729.264	97.24
		<b>Rata – Rata</b>		<b>99.65</b>

*Sumber : Data Diolah (2017)*

Tabel 1 menunjukkan bahwa Varians Pendapatan rata – ratanya hanya sebesar 99.65% artinya Badan Keuangan kota tomohon belum mencapai target dari apa yang ditargetkan.



2. Derajat Desentralisasi  
Derajat desentralisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

**Tabel 2. Derajat Desentralisasi Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase (%)
2011	6.115.546.360	381.064.756.887	1.60
2012	9.584.900.042	386.984.850.513	2.47
2013	11.411.623.314	458.778.268.094	2.55
2014	16.584.810.463	524.519.878.280	3.16
2015	18.602.310.219	18.602.310.219	3.39
<b>Rata - Rata</b>			<b>2.63</b>

Sumber : Data Diolah (2017)

Tabel 2 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasinya harus terus ditingkatkan dikarenakan rata – rata yang didapatkan hanya sebesar 2.63% masih jauh dari kata baik dikarenakan Derajat Desentralisasi yang baik harus ada posisi >50%.

3. Kemandirian Keuangan Daerah  
**Kemandirian Keuangan Daerah = Pendapatan Asli Daerah / (Transfer pusat + Propinsi + Pinjaman ) x 100%**

**Tabel 3. Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase (%)
2011	6.115.546.360	381.064.756.887	1.60
2012	9.584.900.042	386.984.850.513	2.47
2013	11.411.623.314	458.778.268.094	2.55
2014	16.584.810.463	524.519.878.280	3.16
2015	18.602.310.219	18.602.310.219	3.39
<b>Rata - Rata</b>			<b>2.63</b>

Sumber : Data Diolah (2017)

Tabel 3 menunjukkan bahwa Dari tingkat kemandirian Badan keuangan Kota Tomohon belum bisa mandiri dikarenakan rata – rata tingkat kemandirian hanya sebesar 2.71% artinya Badan keuangan daerah masih sangat bergantung kepada pihak – pihak lain.

#### 4. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

**Tabel 4. Analisis Varians Belanja**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase (%)
2011	6.115.546.360	381.064.756.887	1.60
2012	9.584.900.042	386.984.850.513	2.47
2013	11.411.623.314	458.778.268.094	2.55
2014	16.584.810.463	524.519.878.280	3.16
2015	18.602.310.219	18.602.310.219	3.39
<b>Rata - Rata</b>			<b>2.63</b>

Sumber : Data Diolah (2017)

Tabel 4 menunjukkan bahwa Untuk Varians Belanja Badan Keuangan Kota Tomohon sudah ada pada tingkat yang baik, hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa tingkat belanjanya secara keseluruhan tidak melebihi yang sudah dianggarkan.

#### 5. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

**Tabel 5. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja**

Tahun	Realisasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Presentase (%)
2011	21.433.373.806	25.798.067.602	83.08
2012	16.718.698.686	24.728.866.226	67.61
2013	19.237.742.185	22.087.498.185	87.1
2014	21.841.876.067	23.970.476.777	91.11
2015	31.550.043.920	32.001.433.920	98.59
<b>Rata – Rata</b>			<b>85.50</b>

Sumber : Data Diolah (2017)

Tabel 5 menunjukkan bahwa Untuk belanja Operasi Badan Keuangan Kota Tomohon sudah ada pada tingkat yang sewajarnya yaitu pada tingkat 85.50%, dikarenakan tingkat proporsi yang baik untuk Belanja Operasi yang baik berkisar pada 60 – 90%.

6. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \text{Realisasi Belanja Modal} / \text{Total Belanja Daerah}$$

**Tabel 6. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja**

Tahun	Realisasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Presentase (%)
2011	3.961.693.796	25.798.067.602	15,35
2012	4.595.197.667	24.728.866.226	18.58
2013	2.849.756.000	22.087.498.185	12.90
2014	2.128.600.710	23.970.476.777	8.88
2015	450.199.000	32.001.433.920	1.40
<b>Rata – Rata</b>			<b>11.42</b>

Sumber : Data Diolah (2017)

Tabel 6 menunjukkan bahwa Dari segi Belanja Modal Badan Keuangan kota Tomohon sudah ada pada tingkat yang sewajarnya atau sudah ada pada proporsinya yang tepat yaitu sebesar 11.42%.

7. Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja} \times 100\%$$

**Tabel 7. Efisiensi Belanja**

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Presentase (%)
2011	25.798.067.602	29.610.958.953	87.12
2012	24.728.866.226	30.512.068.223	81.04
2013	22.087.498.185	27.580.064.135	80.08
2014	23.970.476.777	29.610.958.953	80.95
2015	32.001.433.920	35.522.281.843	90.08
<b>Rata - Rata</b>			<b>83.85</b>

Sumber : Data Diolah (2017)

Tabel 7 menunjukkan bahwa Efisiensi Belanja Badan Keuangan Kota Tomohon sudah melakukan efisiensi belanja, tingkat efisiensi 83.85% menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah sudah menjalankan efisiensi Belanja dengan baik dimana belanja tidak melebihi dengan apa yang ditargetkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan kinerja pendapatan BKD dapat dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang. Hal ini dilihat dari BKD belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
2. Berdasarkan kinerja belanja BKD dapat dinilai berada pada tingkat yang sudah baik. Hal ini dilihat dari porsi yang diberikan untuk belanja modal dan operasi sudah ada pada porsi sewajarnya dan BKD tidak menggunakan belanja melebihi yang sudah dianggarkan.

### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon harus lebih memaksimalkan semua sumber pendapatan baik berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain – lain pendapatan yang sah agar tetap bisa memenuhi semua kebutuhan Badan Keuangan Daerah kota Tomohon.
2. Badan Keuangan Daerah tetap meningkatkan Efisiensi Belanjanya dalam hal belanja modal dikarenakan Belanja Modal berlaku untuk jangka panjang, dan mengefisienkan balanja operasional .

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, dkk. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilai Kinerja*; Jabpi VOL 22, Juli 2014. ISSN:1411.6871. Diakses tanggal 15 maret 2017.
- Sandy dkk, 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana tahun 2010 – 2014*; E-Journal Bisma universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Volume 4 tahun 2016. Diakses tanggal 15 Maret 2017
- Anim, 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011 – 2013.*; Jurnal EKA CIDA Vol.1 No.1 Maret 2016. ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689. Diakses tanggal 15 maret 2017.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogjakarta
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*.Erlangga
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*